

BPK Dorong Perbaikan Upaya Optimalisasi Waduk dan Modernisasi Irigasi

PELAKSANAAN MODERNISASI IRIGASI BELUM SESUAI DENGAN PEDOMAN TEKNISNYA.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan signifikan dari pemeriksaan kinerja atas Optimalisasi Waduk Multiguna dan Pelaksanaan Modernisasi Irigasi Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022 (Semester I) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020-2024 yaitu pemeriksaan tematik nasional pada Prioritas Nasional (PN) 5 Tahun 2022 yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, khususnya pada Program Prioritas (PP) 1 yakni Infrastruktur Pelayanan Dasar, Kegiatan Prioritas (KP) 6 yakni Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi, dan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) 18 yakni Waduk Multiguna.

Pemeriksaan ini juga dimaksudkan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama menyangkut Target SDGs Nomor 2.4, di mana pada tahun 2030 Indonesia perlu memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan mengimplementasikan praktik-praktik agrikultur yang tahan lama yang dapat menaikkan produktivitas dan produksi. Selain itu, terdapat target SDGs Nomor 6.5, di mana pada tahun 2030 mengimplementasikan pengelolaan sumber air yang terintegrasi pada setiap level, termasuk melalui kerjasama antarbatas selainya.

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai upaya Kementerian PUPR dalam melaksanakan optimalisasi fungsi Waduk Multiguna dan pelaksanaan Modernisasi Irigasi untuk meningkatkan pemenuhan layanan irigasi. Lingkup pemeriksaan adalah kegiatan optimalisasi Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR dan instansi terkait lainnya, dengan daerah sampel yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat, pada Tahun 2020 sampai 2022 (Semester I). Fokus pemeriksaan adalah pada kegiatan optimalisasi Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi, yang meliputi kebijakan, kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring/evaluasi atas optimalisasi Waduk Multiguna dan pelaksanaan Modernisasi Irigasi.

Dari pemeriksaan itu, BPK mencatat upaya dan capaian pemerintah dalam upaya optimalisasi fungsi Waduk Multiguna dan pelaksanaan Modernisasi Irigasi. Dari target pembangunan 63 Waduk Multiguna sesuai RPJMN 2020-2024, hingga akhir 2022 Kementerian PUPR telah berhasil menyelesaikan pembangunan atas 38 bendungan di antaranya, yang bersumber dari APBN. Kemudian, telah terdapat Pedoman Teknis Modernisasi Irigasi, yang diterbitkan melalui Surat Edaran Dirjen SDA Nomor 01/SE/D/2019 tanggal 28 Maret 2019. Modernisasi Irigasi telah dimulai dilakukan terutama atas infrastruktur sarana dan prasarana irigasi pada



PUGO.ID



Fokus pemeriksaan adalah pada kegiatan optimalisasi Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi, yang meliputi kebijakan, kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring/evaluasi atas optimalisasi Waduk Multiguna dan pelaksanaan Modernisasi Irigasi.

sembilan daerah irigasi percontohan, dan hingga akhir 2022 telah terbentuk 12 Unit Pengelola Irigasi sebagai cikal bakal Unit Pengelola Irigasi Modern (UPIM).

Kendati demikian, BPK menemukan beberapa permasalahan signifikan yang berpotensi dapat mengganggu keberhasilan dan ketercapaian Kementerian PUPR dalam proses kebijakan dan kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi atas optimalisasi Waduk Multiguna dan pelaksanaan Modernisasi Irigasi.

Permasalahan-permasalahan dari sisi kebijakan dan kelembagaan antara lain terdapat ketidaksesuaian target pembangunan Bendungan terkait Proyek Prioritas Strategis 18 Waduk Multiguna, yaitu antara target RPJMN dengan

target Renstra Ditjen SDA terkait dan sumber pendanaan alternatif dalam RPJMN selain APBN berupa KPBU belum sepenuhnya dapat terlaksana. Selain itu, Kementerian PUPR belum memiliki paket kebijakan dan regulasi yang lengkap untuk mendukung pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan Waduk Multiguna dan pelaksanaan Modernisasi Irigasi.

Kemudian, dari tahap pelaksanaan, BPK menemukan, pelaksanaan Modernisasi Irigasi belum sesuai dengan pedoman teknisnya. BPK menyimpulkan bahwa apabila permasalahan-permasalahan terkait pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan Waduk Multiguna, serta efektivitas pelaksanaan tahapan modernisasi di atas tidak segera diatasi, maka dapat mempengaruhi pencapaian target nasional yang telah ditetapkan terkait optimalisasi Waduk Multiguna dan pelaksanaan Modernisasi Irigasi.

BPK pun merekomendasikan kepada Menteri PUPR sesuai dengan kewenangannya untuk segera melakukan perbaikan. Dari sisi kebijakan dan kelembagaan, Menteri PUPR perlu menginstruksikan kepada Direktur Jenderal SDA untuk melakukan reviu ulang atas pencapaian target pembangunan dan skema pembiayaan atas Bendungan Multiguna yang telah ditetapkan dalam RPJMN untuk menjamin sinkronisasi targetnya, dan menjadikan reviu ulang tersebut sebagai dasar untuk merevisi renstra Direktorat Jenderal SDA dan menyampaikan bukti sinkronisasi renstra tersebut kepada BPK.

Menteri PUPR juga perlu melakukan percepatan penyusunan peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang SDA dan peraturan pelaksana Permen PUPR tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. Selain itu, BPK juga merekomendasikan untuk membentuk tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Modernisasi Irigasi.

Di tahap pelaksanaan, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan kepada Direktur Jenderal SDA untuk menyempurnakan langkah tahapan modernisasi irigasi melalui penyederhanaan matrikulasi tipologi dan implementasi sesuai dengan kondisi daerah irigasinya. Selain itu, juga perlu ada pedoman dan dokumentasi langkah-langkah pemilihan daerah irigasi yang akan dilakukan modernisasi, sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas temuan, simpulan, dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, Kementerian PUPR menyatakan menerima keseluruhan temuan dan simpulan BPK, dan akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. ~